

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini. (2011). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektik Teori Keagenan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.
- Bungko, H. (2020). *Refocusing dan Realokasi Anggaran itu Apa?* Retrieved April 10, 2022, from Pemerintah Kotamobagu Desa Bungko: <https://bit.ly/3Pk90Oh>
- Hamzah, A. P., & Kustiani, N. A. (2014). *Seri Akuntansi Pemerintah: Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah*. Tangerang Selatan: STAN PRESS.
- Harly, K., & Afriyenti, M. (2017). *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Informasi Finansial Dan Informasi Non-Finansial Pada Kota Solok (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2014-2016)*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Ikhsan, A., & Suprasto, H. B. (2008). *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma* (Edisi Pertama ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Karmila, D., Tinangon, J., & Gamaliel, H. (2021). *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur.
- Lestari, R. A., Pangemanan, S., & Sabijono, H. (2014). *Penerapan Akuntansi Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Meirene, A. H., Pangemanan, S., & Affandi, D. (2014). *Perlakuan Akuntansi Belanja Modal Pada DPPKAD PEMDA Kota Palu*. Palu: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Motoh, J. F., Tinangon, J., & Warongan, J. *Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk belanja pada Dinas Kesehatan Kota Manado*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Mulyana, B. (2014). *Buku Seri Akuntansi Pemerintah Daerah (Buku 8)*. Tangerang Selatan: STAN.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.

Sajiah, F. S. (2021, Februari 10). *Realokasi Belanja untuk Mengatasi Pandemi*. Retrieved Desember 12, 2021, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://bit.ly/3HbNTZD>

Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja*. Samarinda: Universitas Mulawarman.

Suyitno, A. (2020). *Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto*. Meulaboh: Universitas Teuku Umar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.